

**DUKUNGAN AKTOR PERUMUS KEBIJAKAN
TERHADAP PENERAPAN KONSEP GENDER BUDGET
DALAM APBD KOTA SURABAYA**

NIKEN APRILIA

Erna Setijanigrum, S.IP., M.Si

Abstraksi

Penyusunan anggaran adalah sebuah proses yang banyak sekali mengundang pro dan kontra. Meskipun konsep *gender mainstreaming* telah diterapkan dalam Proenas, pada tingkat daerah tidak ada anggaran khusus untuk meningkatkan kesetaraan gender. Analisa budget pemerintah kota (pemkot) memperkuat sinyalemen lemahnya komitmen pemkot Surabaya terhadap program pemberdayaan perempuan. Alokasi dana yang tersedia untuk program-program pemberdayaan perempuan jauh dari rekomendasi alokasi minimum *gender budget* dari APBD.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan terkait dengan bagaimana sebenarnya proses penyusunan sebuah anggaran, siapa saja aktor perumus anggaran, bagaimana dukungan yang diberikan oleh para aktor tersebut, serta apa yang mendasari sikap mereka.. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif eksplanatif dengan wawancara mendalam dan mengacu pada dokumen yang relevan.

Setelah dilakukan analisa dan interpretasi data maka diketahui bahwa pihak yang lebih dominan dalam penentuan jumlah riil anggaran adalah panitia anggaran dalam DPRD. Meskipun dalam proses penyusunannya panitia anggaran menerima masukan dari dinas mengenai usulan dana yang dibutuhkan, panitia anggaran mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak usulan tersebut. Juga dalam regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, yaitu Permendagri No. 13/2006 tidak mengatur secara teknis penyelenggaraan musrenbang seperti pada Kepmendagri No. 29/2002. hal ini menyebabkan tersumbatnya saluran yang selama ini mengakomodasi pihak luar yang mempunyai kepentingan dalam penganggaran.

Selain tersebut diatas, adanya anggaran yang kurang responsif gender juga disebabkan oleh pertama, kurangnya keterwakilan perempuan di dalam susunan pemerintahan, khususnya pejabat penyusun APBD. Kedua, minimnya pengetahuan dan skill perwakilan perempuan tersebut mengenai isu-isu dan konsep gender yang seharusnya bisa mereka

akomodasi secara maksimal melalui kedudukan yang mereka tempati dalam pemerintahan saat ini.

Keywords: Gender budget, Aktor perumus anggaran, Dukungan

